



## Memupuk Minat Bertani

© Rabu, 18 Oktober 2017 09:00 WIB Wahyu Rizka 9 menit



Foto: Keanjika/ones

A A A Pengaturan Font

POPULER DI PERSPEKTIF

Oleh Rizka Muazzam Luthfy, MH

Dalam rangka mencegah kaum muda bekerja ke luar negeri, warga Desa Kesetana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), menginisiasi kelompok tani, inisiatif ini juga muncul lantaran tingginya angka kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal TTS yang mengals rezeki di Malaysia.

Data Batal Pelayanan Pendaftaran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BPSTKI) Kupang menunjukkan, selama Januari-Oktober 2017 terdapat 46 TKI asal NTT meninggal di Negeri Jiran tersebut. Mereka berasal dari 14 kabupaten di NTT, Kabupaten TTS "menyumbang" korban paling besar, 10 orang. Mereka lalu membentuk kelompok tani dengan fokus menanam berbagai jenis sayuran.

Desa sejak lama identik pertanian. Maka, ketika belum muncul berbagai alternatif pekerjaan, mayoritas orang desa bertani. Berbekal keyakinan dan keteguhan, mereka memantapkan diri tetap dalam bidang agraris, termasuk yang tak punya sawah dengan menjadi petani penggarap. Terdapat hubungan saling menguntungkan antara pemilik sawah dan penggarap.

Kini, pertanian semakin kurang menarik bagi kaum muda. Mereka lebih tergiur bekerja korporasi. Minat bertani juga dikalahkan hasrat ke kota untuk mengundi nasib di perantauan. Mereka menjadi buruh pabrik dengan upah di bawah standar atau bekerja serabutan tanpa jaminan perlindungan kerja.

Selain kurang menguntungkan atau bahkan berlimas kerugian, mata pencariannya petani juga kerap dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Bacaan, tontonan, serta semangat zaman mengarahkan para remaja lebih mengutamakan *style*, *gongxi*, *image*, serta pola hidup. Mereka tak tertarik filosofi bertani yang penuh kebijaksanaan dan kearifan moyang. Globalisasi dan modernisasi genap melahutkan generasi instan yang selalu ingin mencapai hasil maksimal, tanpa melewati proses melelahkan. Akibatnya, orangtua gagal regenerasi petani.

Baca Juga :

[A1 High Risk](#)

Pertanian sebagai basis ekonomi pedesaan selalu berhubungan dengan pembangunan. Selama ini pembangunan desa lebih difokusasikan pada upaya mendorong produktivitas kerja penduduk desa. Kaum tani senantiasa dimotivasi dan dihasrangi berproduksi. Sayangnya, masih banyak kendala aerius. Di sanapun ditemukan ketimpangan antara biaya produksi dan hasil penjualan panen.

**Kehilangan**

Berbagai upaya tala ntaga justru mengakibatkan para petani kehilangan peluang menyibir beragam informasi pasar. Sementara itu, masuknya modal ke desa kerap diikuti budaya urban bercorak konsumtif, sehingga memarginalkan kaum tani dan mengasingkan darj

Kapitalisme sebagai ideologi dunia yang begitu menenghram negaranegara berkembang ternyata nentan memalikan pola pertanian tradisional dan komunal. Nilai-nilai modernitas yang merangsak ke hampir semua lini kehidupan memakas alteraktor bidang agraris menyesuaikan diri. Di tengah pucaran perdagangan bebas, cukup tampak bahwa industri pertanian berbasis kapitalistik semakin kokoh, ini meningkatkan risiko kerusakan genetik, lingkungan, budaya, serta kesehatan.

Liberalisasi pertanian juga kian menghancurkan usaha pertanian lokal milik rakyat jua penduduk desa. Di samping meniadakan petani seringkali terancam bahaya kelaparan, hal ini juga mendorong mereka hijrah ke kota atau luar negeri guna berburu rupiah. Akhirnya, yang tersisa di pedalaman hanyalah kemiskinan dan busung lapar (Pangestika Silalahi *et al*), 2012; 106).

Padaahal menurut Buntanul Arifin (2009: 6), wujud keberhasilan revitalisasi pertanian antara lain ditandai kemampuan pembangunan dalam mengentaskan masyarakat petani dan warga pedesaan lainnya dari jeratan serta beloggu kemiskinan. Selama ini, pemahaman ekonomi pembangunan modern, bahkan mazhab neoliberal sekalipun gonap meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor pertanian semata tidak akan mampu memberantas kemiskinan.

Atas dasar inilah, para perumus kebijakan mesti berpikak panuh dan memperhatikan sorus nasib petani dan kelompok miskin lainnya. Langkah paling mendasar melunurkan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang menyentuh kelompok miskin secara langsung. Caranya, investasi besar-besaran pada fak-fak dasar masyarakat dalam sektor kesehatan, kecukupan gizi, serta pendidikan dasar dan menengah.

Keberadaan kelompok tani sebagai salah satu bentuk revitalisasi bidang agraris selajaknya didukung. Pembentukan kelompok tani tidak hanya mendorong kaum muda untuk menggeluti agraris, tetapi juga memupuk ikatan persaudaraan dan kekerabatan antarwarga sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Dalam setiap kesempatan mereka bisa saling berinteraksi dan memotivasi. Ketersamaan dan kekompakan menjadi bekal berharga menghasilkan panen terbaik. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya berdasarkan hasrat individu, tapi juga kohendak kelompok.

Berbagai target tidak sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga demi pemenuhan kepentingan bersama. Dengan memakai prinsip kolektivitas sebagai tolok ukur bekwada, keuntungan tidak hanya sementara. Berbagai program dalam jaringan kelompok tani diupayakan berjangka panjang agar menanjihkan surplus lebih besar. I laiknya mesti demi anggota kelompok tani agar kesejahteraan yang tercipta senantiasa berbasis komunitas.

**Baca Juga :**  
[Wagub Bukan Sekadar Pajangan](#)

Dalam konteks inilah, keberadaan Dadan Usaha Milik Desa (BUMDes) menemukan urgensinya. Buah kelompok tani berupa bahan pangan dapat dipasarkan melalui BUMDes. Lembaga ini memuat kohendak kelompok dengan mengutamakan prinsip, nilai, dan dasar kehidupan bersama dalam mencapai cita-cita komunal. Nuansa golongroyong melandasi setiap anggota BUMDes dalam aktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan.

Mengantongi legitimasi melalui Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes dinilai cukup fleksibel dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. BUMDes merupakan aset desa dengan memajukan usaha-usaha ekonomi di tingkat akar rumput, sekaligus mewujudkan keteguhan masyarakat pedesaan dalam memperbaiki taraf hidup. BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga pembiayaan warga yang ingin meningkatkan usaha setempat. Lebih dari itu, BUMDes mampu mengelola potensi, keragaman, kearifan lokal serta memberdayakan warga yang berada di garis kemiskinan.

*Penulis sedang menyelesaikan Program Doktor UII Yogyakarta*



**Berita Terkait**

[Lihat Lainnya >](#)

**Komentar**

Nama  Email

Berikan Komentar

Submit

**Komentar (0)**

